



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025



STASIUN PSDKP BELAWAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di triwulan I Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 12 April 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan triwulan I Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 105,80. Selama triwulan I Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 7 indikator kinerja, dimana 14 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester 1 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 7 indikator kinerja:

1. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
2. Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
3. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 65 dan capaian sebesar 81;
4. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 65 dan capaian sebesar 81;
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) target 100 dan capaian 100;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 95% dan capaian sebesar 100%;
7. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 80 dan capaian 83,18.

Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 29,77% atau sebesar Rp **8.114.964.072,-** (Delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) dari alokasi anggaran Rp **27.261.542.000,-** (Dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Isu AkBelawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	9
D. Data Umum Organisasi.....	10
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	14
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2025	15
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2025.....	17
C. Program Kerja Pengawasan SDKP	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
E. Pengukuran Capaian Kinerja.....	21
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025 22	
1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2025	22
2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 Tahunan	22
B. Analisis Pencapaian Kinerja	25
1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan.....	25
2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.....	29
3. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	36
4. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	39
C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Dengan Satker UPT Sejenis / Setara.....	44
D. Efisiensi.	47

E. Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV.....	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran dan Rekomendasi	48

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi	13
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025	19
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2025.....	23
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2025.....	24
Tabel 6. Capaian IKU 4.....	26
Tabel 7. Rekap pemeriksaan SDK triwulan I.....	28
Tabel 8. Rekap Pengawasan PRL.....	28
Tabel 9. Pemeriksaan IKU 5.....	30
Tabel 10. Capaian IKU 5.....	30
Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan.....	32
Tabel 12 Rekapitulasi Penerbitan SLO	32
Tabel 13. Rekap Pengawasan Pengolahan	33
Tabel 14. Capaian IKU 9.....	37
Tabel 15. Rekap penganan sanksi administratif	38
Tabel 16. Capaian IK 10	41
Tabel 17. Capaian IK 18.....	42
Tabel 18. Capaian IK 26.....	43
Tabel 19. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2025	48

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan.....	12
Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.....	13
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan	14
Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidangkelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kealutan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan I, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan- kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan transshipment di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.
- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.
- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

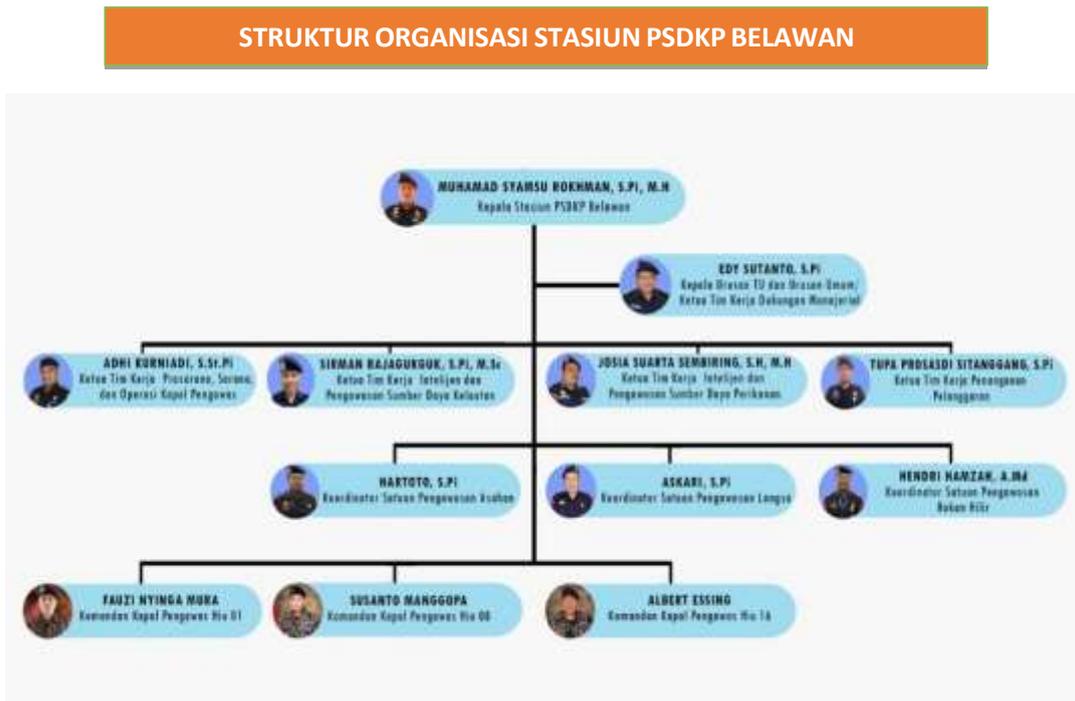
c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-

masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir

4. Armada Pengawas dan Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan speedboat pengawas. Berikut data kapal pengawas dan speedboat pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan
5	Dolphin 014	8 Meter	Satwas Asahan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 128 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 69 orang, 25 orang PPPK, 9 orang PPNPN dan PJLP sebanyak 25 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	PJLP	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	7	5	13	53
2	Satwas SDKP Langsa	3			1	4
3	Wilker PSDKP Idi	2			2	4
4	Wilker PSDKP Lhokseumawe	1	1			2
5	Wilker PSDKP Biureun	1				1
6	Wilker PSDKP Sigli		1			1
7	Satwas SDKP Asahan	5	3	3	1	12
8	Wilker PSDKP Batubara				1	1
9	Satwas SDKP Rokan Hilir	3		1	1	5
10	Wilker PSDKP Panipahan				1	1
11	Wilker PSDKP Dumai	1			1	2
12	Wilker PSDKP Kepulauan Meranti	2				2
13	Wilker PSDKP Tembilahan	2				2
14	Hiu 01	8	3		1	12
15	Hiu 08	6	5		1	12
16	Hiu 16	7	3		2	12
	Luar Belawan		2			2
Jumlah Total		69	25	9	25	128

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025 - 2029; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2025; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025 – 2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025 - 2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 - 2029 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokusan kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 – 2029 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
SK. 2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
		03	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	04	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	05	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
SK. 5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	06	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92
		07	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92
SK. 6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana	08	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT	100

	Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan		Stasiun PSDKP Belawan (%)	
SK. 7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	81
SK. 8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	94
SK. 9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	81,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	87
		15	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88,5
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	80
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	1
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	70

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 105,80% untuk triwulan I, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 21 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja triwulan I Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2025	MARET	MARET	
SK1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						0	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0	0	0
SK2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						0	
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	0	0
3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	0	0
SK3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan						100	
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan						100	
5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
SK5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						0	
6	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
7	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
SK6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						0	
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	0
SK7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						120	
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	65	81	120
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	65	81	120
SK8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						0	
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	0	0	0
SK9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						103,20	
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,5	0	0	0

13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	0	0	0
15	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0	0	0
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,5	80	83,18	103,98
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0	0
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0	0	0
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0	0	0

Pada triwulan I tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 21 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 7 IK dilaksanakan dengan kriteria 5 IK dengan predikat baik, 2 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang triwulan I tahun 2025. Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 29,77% atau sebesar Rp **8.114.964.072,-** (Delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) dari alokasi anggaran Rp **27.261.542.000,-** (Dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12,642,051,000	3,876,879,964	30,67%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	61,237,000	46,536,000	75,09%
3	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	136,708,000	12,241,815	8,95%
5	Dukungan Manajemen	14,421,546,000	4,179,306,293	28,98%
Total		27.261.542.000	8.114.964.072	29,77%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 7 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu;

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan. Kondisi ini tidak berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2024. Penjabaran sasaran kegiatan pada 1 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan.

a. IKU 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tahapan pemeriksaan IKU 4

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2025	TW I	s/d	TW I
			2025	TW I	2024
Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Berikut kami sajikan rekapitulasi data pengawasan SDK selama Triwulan I tahun 2025 lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 8. Rekap pemeriksaan SDK triwulan I

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2024
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	1
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	0
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	2
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	7
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	-	-
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		1	10

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu

ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 1 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Terdapat 1 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 9. Rekap Pengawasan PRL

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Ibu Sri Hartati	<ul style="list-style-type: none">- Ibu Sri Hartati memiliki beberapa dokumen perizinan berusaha berbasis resiko, antara lain:- 1. Nomor Induk Berusaha 1803250050304 terbit tanggal 18/03/2025;- 2. Sertifikat Standar Sertifikat Standar terbit tanggal 18/03/2025;- 3. SPPL 1803250050304 terbit tanggal 18/03/2025;- Keseluruhan dokumen tersebut dipergunakan untuk KBLI 93224-Wisata Pantai, yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan klasifikasi resiko menengah rendah. Namun dikarenakan terdapat penempatan struktur pemecah ombak yang pada areal pesisir yang memanfaatkan ruang laut dengan luasan fisik sebesar 0,16030 Ha, dan luasan perairan 0,88757 Ha, dengan total luasan sejumlah 1,04787 Ha- Dengan memperhatikan hasil pengawasan di lapangan, menelaah dokumen perizinan yang dimiliki serta menimbang ketentuan ketentuan dalam pemanfaatan ruang laut, maka ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, berupa penempatan struktur bangunan pemecah ombak yang dilakukan tanpa memiliki izin KKPLR dari Pemerintah Indonesia, yang dilakukan oleh Ibu Sri Hartati

2. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Indeks Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2024. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. IKU 5: Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

IKU indeks Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Indeks kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 10. Pemeriksaan IKU 5

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 6.

Tabel 11. Capaian IKU 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I 2025	2025	TW I 2025	s/d TW I 2024	TW I 2024
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak stakeholder yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Sepanjang triwulan I tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 perusahaan.

Tabel 12 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan

NO	BULAN	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	Total
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	1	0	1
3	Maret	0	0	0	0	0
	Total	0	0	1	0	0
	Target					100

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Pada TW I Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan belum ada melaksanakan Pengawasan terhadap pelaku usaha kapal perikanan namun Stasiun PSDKP Belawan melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu triwulan I Stasiun PSDKP Belawan telah menerbitkan 306 SLO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13 Rekapitulasi Penerbitan SLO

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	2025								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	341	234	234	-	-	-	341	234	234
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Satwas PSDKP Langsa				-	-	-			
8	Kabupaten Aceh Timur	10	5	5	-	-	-	10	5	5
9	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-			
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)	-	-	-	-	-	-			
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	-	-	-	-	-	-			
12	Kabupaten Pidie	-	-	-	-	-	-			
13	Kabupaten Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	37	67	67	-	-	-	37	67	67
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	388	306	306	-	-	-	388	306	306

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2025 kepada 3 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 14. Rekap Pengawasan Pengolahan

No	Nama Perusahaan / Perorangan	Kode Proyek / KBLI	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi
1	PT SEAFOOD SAMUDERA PASIFIC	202008-0108-4016-7912-262	OSS	Nilai tingkat kepatuhan untuk KBLI 10213 yaitu 100 % (baik sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

3. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

- Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

a. **IKU 9: Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)**

Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan penenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. penenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. penenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a* : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b* : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 80 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 12 dari 14 kasus pengenaan administrasi yang terdiri dari 8 Kasus SPKP dan 4 Kasus Pelanggaran Perizinan sedangkan 2 Kasus Pelanggaran Perizinan masih dalam tahap proses pemanggilan untuk permintaan klarifikasi. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 15. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2025	TW I 2025	s/d TW I	TW I 2024
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	65	81	81	81	80

Tabel 16. Rekap pengenaaan sanksi administratif

Perhitungan Capaian Sanksi Administrasi SPKP																		
NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT					CAPAIAN IKU		
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILA	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2		DENDA	PIDANA
						<30 hari	>30 hari	Total										
1	BELAWAN	-	2	-	18	-	-	-	20	-	20	20	-	20	-	-	-	100%
	TOTAL	-	2	-	18	-	-	-	20	-	20	20	-	20	-	-	-	100%

NO	TGL PEMERIKSAAN	NAMA KAPAL PEMERIKSA	LOKASI PEMERIKSAN	NAMA KAPAL TERPERIKSA	NAMA PEMILIK KAPAL	GT KAPAL	LOKASI KAPAL	API	JENIS PELANGGARAN	SURAT PERINTAH KLARIFIKASI		BAP KLARIFIKASI				SANKSI ADMINISTRASI
										NOMOR	TANGGAL	PEMILIK		NAKHODA		
												TGL	PETUGAS KLARIFIKASI	TGL	PETUGAS KLARIFIKASI	
1	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	BINTANG TERANG - XX	SUDARSONO	92	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill	B.723/PSDKPSta.2/TU.330 /III/2025	13/Mar/24	25 Februari 2025	SIRMAN RAJAGUKGUK			SP I
2	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	DHARANA LASTARYA 89	BSA	89	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill			25 Februari 2025	ADHI KURNIAWAN			SP I
3	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TANTYA SUDHIRAJATI 35	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill			25 Februari 2025	TUPA PROSADI SITANGGANG			SP I
4	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	PARAHITA RAKSAKA 40	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill	B.827/PSDKPSta.2/TU.330 /III/2025	25/03/24	25 Februari 2025	ADHI KURNIAWAN			SP I
5	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TATHYA DHARAKA 37	BSA	92	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill	B.828/PSDKPSta.2/TU.330 /III/2025	25/03/24	25 Februari 2025	TUPA PROSADI SITANGGANG			SP I
6	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	SELAMAT JADI - XI	TONG TEK SAMAN	89	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill	B.808/PSDKPSta.2/KP.440 /III/2025	21/03/2025	25 Februari 2025	NUR BAETY ALIFIANY			SP I
7	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TANTYA SUDHIRAJATI I 35	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill			25 Februari 2025	ZULKARNAIN NASUTION			SP I
8	25 Februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	PARAHITA RAKSAKA III 40	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill			25 Februari 2025	DENGGAN M. ILMI			SP I
9	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	PARAHITA RAKSAKA I 40	BSA	92	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill			26 februari 2025	DENGGAN M. ILMI			SP I
10	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	PELITA KENCANA - II	JONY	89	Belawan	Kapal Pangankut	Pelabuhan Pangkalan			26 februari 2025	ZULKADRIHANI			SP I
11	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	DHARANA LASTARYA III 89	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mill			26 februari 2025	ABUL HAYYI			SP I

12	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TATHYA DHARAKA I 37	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			26 februari 2025	ZULKARNAIN NASUTION			SP I
13	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TANTYA SUDHIRAJATI 35	BSA	92	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			26 februari 2025	TUPA PROSADI SITANGGANG			SP I
14	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TATHYA DHARAKA III 37	BSA	89	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			26 februari 2025	ABUL HAYYI			SP I
15	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TANTYA SUDHIRAJATI III 35	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			26 februari 2025	NUR BAETTY ALIFIANI			SP I
16	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	PELITA KENCANA - II	JONY	94	Belawan	Kapal Pengangkut	Pelabuhan Pangkalan			26 februari 2025	ZULKADRIHANI			SP I
17	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TANTYA SUDHIRAJATI I 35	BSA	92	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			26 februari 2025	ZULKARNAIN NAUTION			SP I
18	26 februari 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	DHARANA LASTARYA II 89	BSA	89	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			26 februari 2025	ZULKARNAIN NASUTION			SP I
19	18 Maret 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	TANTYA SUDHIRAJATI II 35	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			18 Maret 2025	ABUL HAYYI			SP I
20	18 Maret 2025	LIP	Perairan Selat Malaka	WIRA SATYA PRADHANA	BSA	94	Belawan	Jaring Hela Ikan Berkantong	Melanggar DPI dibawah 12 mml			18 Maret 2025	DENGGAN M. ILMU			SP I

Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan TW I 2025

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama triwulan I tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 46,536,000,- atau sekitar 75,99% dari total pagu Rp. 61,237,000,-.

5. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
2. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
4. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%);
5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
6. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;

8. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi);
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

Selama kurun waktu triwulan I Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 3 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 1,7, dan 10.

a. IK 18: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada triwulan I Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 88,04 dari target 80. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 17. Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2025	TW I 2025	s/d TW I	TW I 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	83,18	88,5	83,18	83,18	80

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

b. IK 16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan

yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan I tahun 2025**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 28. Capaian IK 15

Indikator Kinerja			Target		Realisasi		
			TW I 2025	2025	TW I 2025	s/d TW I 2024	TW I 2024
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100	100	

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

c. IK 21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Keikutsertaan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;
- o Keaktifan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffice dengan target 94% pada triwulan I Tahun 2025. Capaian IK Stasiun PSDKP Belawan sebesar 120%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan I Tahun 2025 mengadopsi perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I. Capaian pada triwulan ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffice dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. Berikut kami sajikan data capaian dalam bentuk tabel.

Tabel 29. Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I 2025	2025	TW I 2025	s/d TW I 2023	TW I 2023
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	94%	94%	120%	120%	85,19%

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator Coffice yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;
- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Stasiun PSDKP Belawan baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffice;
- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau dan memacu keaktifan pemegang akun untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah

- Keaktifan Stasiun PSDKP Belawan dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi;
- Melaksanakan kegiatan internal yang aktif dalam mendukung capaian kinerja.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Belawan telah membandingkan hasil capaian kinerja dengan Satker UPT setara/ sejenis pada TW I tahun 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 9 IKU dengan capaian 9 Kinerja tercapai 100%. Bila dibandingkan hasil capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan 5 (lima) UPT satker setara/ sejenis Stasiun PSDKP Belawan , Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut;

- IKU-4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%

- IKU-5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%

- IKU-9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	65	81	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	65	65	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	65	65	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	65	81	120%
5	Stasiun PSDKP Belawan	65	81	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	65	65	100%

- IKU-10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	65	81	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	65	81	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	65	81	120%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	65	81	120%
5	Stasiun PSDKP Belawan	65	81	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	65	65	100%

- IKU-18 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik
Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	88,5	89,37	100,98%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	99,38	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	88,5	94,82	107,14%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	88,5	92,55	104,58%
5	Stasiun PSDKP Belawan	80	83,18	103,98%
6	Stasiun PSDKP Kupang	88,5	97,55	110,23%

- IKU-16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis
Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%

5. Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada Stakeholder, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai Triwulan I Tahun 2025. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dalam Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada triwulan I 2025 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut :

1. Pemanfaatan Google Drive

Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Belawan.

2. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

6. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 tanggal 02 Desember 2024, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 27,261,542,000,-. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar Rp. 8,114,964,072 atau 29,77% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama triwulan I Tahun 2025, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun triwulan I tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 105,80. Selama kurun waktu triwulan I UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 7 Indikator Kinerja. 2 IK biru (istimewa) 5 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode triwulan II Tahun 2025. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2025 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 30. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2025

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap capaian IK IP ASN	<ul style="list-style-type: none">• Mengadakan kroscek data berdasarkan capaian IP ASN pada aplikasi berbasis web.• Melakukan penyampaian melalui WAG agar setiap pegawai dapat memenuhi kewajiban dalam pemenuhan IP ASN	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan II

